



**PENDEKATAN *PLANNING AS SOCIAL LEARNING* DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI
DESA MERAH PUTIH DI DESA MARINDAL II, KABUPATEN DELI
SERDANG**

*Planning as Social Learning Approach in Community Economic
Empowerment Through Merah Putih Village Cooperative in Marindal II
Village, Deli Serdang Regency*

**Rolinta Damanik^{*1}, Erika Revida MS², Ebenezer Siburian³, Yandri Petra
Perangin-angin⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Sumatera Utara, Indonesia

***Email: rolinta.damanik@bps.go.id**

Abstract

This study analyzes the implementation of the Planning as Social Learning approach in community economic empowerment through Koperasi Desa Merah Putih Marindal II in Patumbak, Deli Serdang Regency. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through semi-structured interviews with the cooperative chairperson, the Head of the Cooperative and Micro, Small, and Medium Enterprises Office of Deli Serdang Regency, and two active cooperative members. The findings indicate that the cooperative was established mainly as a follow-up to Presidential Instruction No. 9 of 2025, with limited member participation in planning and decision-making. Most strategic decisions remain dominated by the management board. Informal learning among members has begun through shared business experiences and online communication, but structured collective evaluation is still lacking. Economically, the cooperative has provided benefits to micro-entrepreneurs by improving access to supplies and strengthening local networks. However, limited capital, managerial capacity, and low public trust remain significant challenges. The study concludes that the cooperative is still in the early stage of institutional development and requires stronger member participation and more structured evaluation mechanisms.

Keywords: *Planning as Social Learning, Koperasi Desa Merah Putih, economic empowerment, participation, village institutions*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan *planning as social learning* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Ketua Koperasi, Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang, serta dua anggota koperasi aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koperasi masih diprakarsai pemerintah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Partisipasi anggota dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas, sementara sebagian besar keputusan ditentukan oleh pengurus. Proses pembelajaran antar anggota mulai terlihat melalui berbagi pengalaman usaha dan komunikasi informal, namun belum dilakukan melalui evaluasi bersama yang rutin. Secara ekonomi, koperasi telah membantu pelaku*

usaha mikro melalui kemudahan akses bahan usaha dan penguatan jaringan lokal. Namun, keterbatasan modal, kapasitas pengelola, dan rendahnya kepercayaan masyarakat masih menjadi tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan dan memerlukan peningkatan partisipasi anggota serta mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur.

Kata Kunci: *Planning as social learning, koperasi desa Merah Putih, pemberdayaan ekonomi, partisipasi, dan kelembagaan desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan makro pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Salah satu instrumen yang sejak lama digunakan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Indonesia adalah koperasi. Dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945, koperasi diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Namun, dalam praktiknya, tidak semua koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberdayakan anggotanya secara optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya merevitalisasi peran koperasi melalui pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan nasional. Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Secara nasional, program Koperasi Desa Merah Putih telah diimplementasikan di lebih dari 80.000 desa sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi lokal berbasis kelembagaan desa (Saputri et al., 2025). Meskipun demikian, pembentukan koperasi berbasis kebijakan pusat seringkali menghadapi tantangan pada tahap implementasi, terutama dalam hal partisipasi anggota, kapasitas pengelolaan, serta keberlanjutan kelembagaan.

Di tingkat lokal, Koperasi Desa Merah Putih Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan tersebut. Desa Marindal II memiliki aktivitas ekonomi yang didominasi oleh usaha mikro dan perdagangan kecil, namun masih menghadapi keterbatasan modal, literasi keuangan, dan akses lembaga keuangan formal. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Namun, penting untuk melihat sejauh mana koperasi ini benar-benar menjadi ruang partisipasi dan pembelajaran bersama, atau sekadar menjalankan fungsi administratif sebagai tindak lanjut kebijakan.

Dari perspektif teori perencanaan, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan *Planning as Social Learning* yang dikemukakan oleh John Friedmann (1987). Teori ini menekankan bahwa perencanaan tidak hanya bersifat teknis dan *top-down*, tetapi merupakan proses belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog, pengalaman, dan refleksi. Dalam konteks koperasi desa, konsep ini relevan untuk melihat apakah koperasi benar-benar menjadi ruang pembelajaran kolektif yang memperkuat kapasitas ekonomi anggota.

Sejauh ini, penelitian mengenai Koperasi Desa Merah Putih lebih banyak menyoroti aspek legalitas, pemberdayaan normatif, atau strategi pengembangan kelembagaan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis koperasi desa

dari perspektif pembelajaran sosial dalam tahap awal implementasi kebijakan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan *planning as social learning* dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Marindal II. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika partisipasi, proses pembelajaran antar anggota, serta tantangan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Tinjauan Pustaka

Koperasi merupakan lembaga ekonomi berbasis masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui usaha bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan berfungsi tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat. Secara konseptual, koperasi memiliki fungsi ekonomi seperti penyediaan akses permodalan dan peningkatan produktivitas, serta fungsi sosial berupa pembelajaran kolektif, solidaritas, dan partisipasi demokratis (Mujino, 2012). Peran ini diperkuat oleh Dwika dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa koperasi mendukung usaha mikro melalui pembiayaan, pelatihan, dan jaringan usaha, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola dan partisipasi anggota.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, koperasi menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri (Sumodiningrat, 1999). Pemberdayaan tidak hanya mencakup akses modal, tetapi juga penguatan organisasi dan jejaring usaha. Yani dan Wahyuni (2026) menunjukkan bahwa pendekatan *community development* meningkatkan partisipasi anggota, sementara Mashuri dan Ediyono (2025) menegaskan bahwa peningkatan pendapatan terjadi ketika terdapat kemitraan aktif antara masyarakat dan pemerintah. Namun, keberhasilan koperasi juga ditentukan oleh kepercayaan publik yang bergantung pada transparansi dan kapasitas pengelola (Suyitno dkk., 2025).

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai kebijakan nasional untuk memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi yang terintegrasi. Program ini bertujuan mengembangkan unit usaha desa, memperluas akses pembiayaan mikro, dan membangun jaringan distribusi lokal. Secara normatif, kebijakan ini memperkuat posisi koperasi sebagai badan hukum ekonomi rakyat (Maryam, 2025), dengan keberhasilan yang ditentukan oleh penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan dan digitalisasi (Arief & Haeruddin, 2025). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan manajerial, rendahnya partisipasi anggota, serta kesenjangan antara kebijakan dan praktik (Suyanto & Raenaldi, 2025).

Untuk memahami dinamika tersebut, pendekatan *Planning as Social Learning* menjadi relevan. Friedmann (1987) memandang perencanaan sebagai proses belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat, yang mengintegrasikan pengetahuan ahli dan pengalaman lokal. Argyris dan Schön (1978) membedakan pembelajaran teknis (*single-loop*) dan reflektif (*double-loop*) yang penting untuk adaptasi kelembagaan. Hal ini sejalan dengan *experiential learning* Kolb (1984), yang menekankan siklus pengalaman dan refleksi. Selain itu, Healey (1997) menekankan pentingnya dialog kolaboratif,

sementara Innes dan Booher (2003) melalui *collaborative rationality* menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif lahir dari interaksi inklusif dan berbasis pengetahuan bersama.

Meskipun berbagai kajian telah membahas koperasi desa dari aspek kelembagaan dan pemberdayaan, kajian yang menempatkannya sebagai ruang pembelajaran sosial masih terbatas. Padahal, pada tahap awal pembentukan koperasi, interaksi, komunikasi, dan pengalaman bersama sangat menentukan arah perkembangan organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada Koperasi Desa Merah Putih Marindal II untuk melihat bagaimana proses *Planning as Social Learning* berlangsung dalam praktik, baik dari sisi ekonomi maupun dinamika partisipasi dan pembelajaran kolektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian koperasi desa sebagai institusi ekonomi sekaligus ruang pembelajaran sosial di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, dan pengalaman para aktor dalam implementasi pendekatan *Planning as Social Learning* pada Koperasi Desa Merah Putih Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, interaksi sosial, serta dinamika partisipasi yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif, sementara metode studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap satu kasus dalam konteks nyata, khususnya karena koperasi ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional dan telah menjalankan kegiatan usaha secara aktif.

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Desa Merah Putih Marindal II dengan pertimbangan bahwa koperasi tersebut dibentuk dalam kerangka kebijakan nasional, memiliki aktivitas usaha yang berjalan, serta menunjukkan dinamika partisipasi anggota dan keterlibatan pemerintah desa yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan *Planning as Social Learning*. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling berdasarkan peran dan keterlibatan langsung, yang terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang sebagai representasi pemerintah daerah, Ketua Koperasi sebagai pengelola utama, serta dua anggota koperasi aktif yang menjalankan usaha mikro. Pemilihan ini bertujuan memperoleh perspektif yang komprehensif dari sisi kebijakan, pengelolaan, dan pengalaman anggota.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur secara langsung dengan informan, menggunakan pedoman yang disusun berdasarkan konsep *Planning as Social Learning*, yang mencakup aspek proses pembentukan koperasi, mekanisme perencanaan program, partisipasi dalam pengambilan keputusan, proses komunikasi dan musyawarah, pembelajaran antaranggota, dampak ekonomi, serta tantangan dan dukungan pemerintah. Selain itu, data juga diperoleh melalui dokumentasi kegiatan koperasi dan kebijakan terkait untuk memperkuat hasil wawancara.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan membaca ulang transkrip wawancara, mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama, serta mengidentifikasi pola yang muncul dari jawaban informan. Selanjutnya, data

diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada konsep *Planning as Social Learning* guna memahami dinamika partisipasi, proses pembelajaran sosial, serta mekanisme pengelolaan koperasi. Fokus penelitian diarahkan pada partisipasi anggota dalam perencanaan, proses dialog dan musyawarah, pembelajaran sosial antaranggota, implementasi program dan dampak ekonomi, serta peran pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Pembentukan dan Karakter Awal Kelembagaan

Koperasi Desa Merah Putih Marindal II dibentuk pada bulan Juni 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi desa secara nasional. Secara empiris, pembentukan koperasi dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus yang difasilitasi oleh pemerintah desa, disertai pembentukan kepengurusan dan penetapan struktur organisasi. Partisipasi masyarakat pada tahap awal terlihat dalam bentuk kehadiran pada forum musyawarah serta pendaftaran sebagai anggota koperasi. Sementara itu, kerangka kebijakan dan arah pembentukan kelembagaan telah dirumuskan terlebih dahulu dalam desain kebijakan nasional.

Pada fase awal operasional, koperasi ini mencatat jumlah anggota sebanyak 189 orang. Struktur permodalan dibangun melalui skema simpanan pokok sebesar Rp50.000 yang dibayarkan satu kali saat pendaftaran, simpanan wajib sebesar Rp20.000 per bulan per anggota, dan simpanan sukarela. Selain kontribusi anggota, dukungan permodalan awal juga berasal dari penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kombinasi antara iuran anggota dan dukungan kelembagaan desa ini menunjukkan bahwa koperasi dibangun dengan memadukan modal sosial masyarakat dan dukungan struktural pemerintah desa sebagai fondasi awal penguatan ekonomi bersama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih Marindal II pada tahap awal berkembang dalam kerangka kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional, sekaligus bertumpu pada partisipasi finansial anggota sebagai bentuk komitmen kolektif. Dalam praktik perencanaan publik, pola seperti ini merupakan hal yang lazim, terutama ketika kebijakan bertujuan mempercepat pembentukan institusi ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, pembentukan koperasi dapat dipahami sebagai fase institusionalisasi awal yang menyediakan struktur dasar bagi berkembangnya aktivitas ekonomi dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif *Planning as Social Learning* yang dikemukakan oleh Friedmann (1987), perencanaan dipahami sebagai proses sosial yang interaktif, di mana pengalaman masyarakat dan pengetahuan teknis bertemu dalam dialog untuk membentuk tindakan kolektif. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih Marindal II, struktur kelembagaan dan skema permodalan telah lebih dahulu tersedia sebagai kerangka kerja formal. Tantangan selanjutnya bukan semata pada keberadaan struktur tersebut, melainkan pada bagaimana struktur dan modal kolektif yang telah terbangun dapat berkembang menjadi ruang interaksi reflektif yang memungkinkan pembelajaran bersama. Kontribusi finansial anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib sesungguhnya dapat dipandang sebagai titik awal pembentukan *sense of ownership* yang menjadi prasyarat penting dalam pembelajaran sosial.

Keberlanjutan dan efektivitas koperasi selanjutnya sangat bergantung pada kualitas partisipasi anggota, rasa memiliki terhadap kelembagaan, serta kapasitas internal untuk mengembangkan mekanisme evaluasi bersama. Oleh karena itu, kondisi awal yang bersifat administratif dan berbasis dukungan modal campuran di Koperasi Desa Merah Putih Marindal II dapat dipahami sebagai fondasi kelembagaan yang membuka peluang bagi berkembangnya pembelajaran sosial pada tahap berikutnya.

Dengan demikian, fase awal pembentukan koperasi dipahami sebagai tahap awal dalam proses yang lebih panjang. Perkembangan ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana distribusi peran, perluasan partisipasi, dan penguatan dialog kolektif dapat tumbuh secara bertahap dalam tata kelola koperasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan proporsional terhadap dinamika kelembagaan di tingkat desa.

Dinamika Partisipasi Anggota dalam Proses Perencanaan

Partisipasi anggota dalam Koperasi Desa Merah Putih Marindal II tercermin melalui keterlibatan dalam forum formal seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, komunikasi sehari-hari berlangsung cukup aktif melalui grup WhatsApp yang berfungsi sebagai media koordinasi kebutuhan usaha, pertukaran informasi harga, serta penyampaian aspirasi terkait pengelolaan koperasi. Anggota memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, khususnya dalam hal kebutuhan barang dan pengembangan unit usaha.

Dalam praktik pengambilan keputusan strategis, peran pengurus masih cukup menonjol, terutama dalam menentukan arah operasional dan kebijakan jangka pendek. Hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat forum rutin yang secara khusus dirancang untuk merumuskan program bersama melalui diskusi tatap muka yang mendalam dan terstruktur. Namun demikian, kondisi ini perlu dipahami dalam konteks usia kelembagaan koperasi yang relatif masih sangat muda, mengingat koperasi baru dibentuk pada Juni 2025. Dalam fase awal pembentukan organisasi, konsolidasi struktur dan stabilitas operasional seringkali menjadi prioritas sebelum pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih luas.

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, mekanisme partisipasi yang ada dapat dipahami sebagai proses yang sedang bertumbuh. Struktur partisipasi telah tersedia secara formal, dan ruang komunikasi telah terbuka, meskipun kedalaman keterlibatan anggota dalam proses perumusan keputusan masih berada pada tahap awal penguatan. Partisipasi yang berkembang secara bertahap ini menunjukkan bahwa koperasi sedang melalui proses institusionalisasi internal yang memerlukan waktu untuk membentuk pola interaksi yang lebih reflektif dan kolaboratif.

Dalam perspektif *Planning as Social Learning*, Friedmann (1987) menempatkan partisipasi sebagai inti dari proses pembelajaran sosial, di mana aktor terlibat dalam memahami persoalan bersama dan menyusun solusi melalui dialog. Proses ini umumnya tidak terjadi secara instan, melainkan berkembang seiring terbentuknya kepercayaan (*trust*), pengalaman bersama, dan stabilitas organisasi. Argyris dan Schön (1978) juga menjelaskan bahwa pembelajaran organisasi berlangsung secara bertahap, dimulai dari perbaikan praktik operasional sebelum berkembang menuju refleksi yang lebih mendalam terhadap asumsi dan pola kerja organisasi. Dengan demikian, partisipasi di Koperasi Desa

Merah Putih Marindal II dapat dipahami sebagai bagian dari proses evolusi kelembagaan menuju model pembelajaran kolektif yang lebih matang. Pada fase awal, struktur pengurus sering memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan arah operasional, sementara distribusi peran yang lebih luas berkembang seiring meningkatnya kapasitas dan rasa percaya antar anggota.

Ke depan, seiring bertambahnya usia kelembagaan dan stabilitas usaha, pengembangan forum dialog yang lebih reguler dan terstruktur dapat menjadi langkah strategis untuk memperdalam kualitas partisipasi. Dengan demikian, koperasi berpotensi tumbuh tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran masyarakat yang berkembang secara progresif.

Dinamika Pembelajaran Sosial dan Analisis Tematik

Pembelajaran sosial dalam Koperasi Desa Merah Putih Marindal II mulai terlihat melalui pertukaran pengalaman usaha antar anggota. Informasi mengenai harga bahan, distribusi barang, pola pembayaran pelanggan, hingga strategi mempertahankan usaha kecil dibagikan secara aktif melalui komunikasi informal dan media daring. Selain itu, anggota juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan tambahan modal serta wacana pembentukan unit usaha baru. Interaksi tersebut menunjukkan adanya ruang komunikasi yang berpotensi menjadi dasar pembelajaran kolektif.

Dalam konteks kelembagaan yang masih relatif baru, proses pembelajaran ini berkembang secara alami melalui praktik sehari-hari (*learning by doing*). Anggota belajar dari pengalaman bersama, baik dalam hal pengelolaan stok, pemasaran, maupun penguatan jaringan usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah mulai berfungsi sebagai ruang pertukaran pengetahuan ekonomi berbasis pengalaman.

Namun demikian, proses pembelajaran tersebut belum sepenuhnya terlembagakan melalui forum evaluasi rutin atau refleksi terstruktur. Interaksi yang terjadi masih bersifat kontekstual dan berbasis kebutuhan operasional, belum berkembang menjadi agenda evaluasi bersama yang sistematis mengenai tata kelola organisasi. Untuk melihat gambaran ini secara lebih sistematis, hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Matriks Analisis Implementasi *Planning as Social Learning* pada Koperasi Desa Merah Putih Marindal II

Dimensi Analisis	Temuan Lapangan	Kategori Tematik	Keterkaitan dengan <i>Planning as Social Learning</i>	Implikasi Pengembangan
Proses Perencanaan	Program operasional dirumuskan oleh pengurus dengan mempertimbangan kebutuhan anggota	Struktur awal kelembagaan	Struktur formal tersedia sebagai fondasi pembelajaran	Perlu penguatan dialog kolektif dalam perumusan program
Partisipasi	Anggota aktif dalam forum formal dan komunikasi melalui WhatsApp	Partisipasi administratif menuju reflektif	Partisipasi merupakan prasyarat pembelajaran sosial	Pendalaman kualitas partisipasi diperlukan

Proses Pembelajaran	Berbagi pengalaman usaha dan informasi pasar	Pembelajaran berbasis interaksi	Selaras dengan konsep learning-by-interaction	Perlu pelembagaan refleksi bersama
Aspirasi Ekonomi	Muncul kebutuhan unit simpan pinjam dan penguatan modal	Aspirasi kolektif	Potensi produksi keputusan bersama	Forum deliberatif perlu diperkuat
Kepercayaan Sosial	Tingkat kepercayaan masyarakat masih berkembang	Modal sosial kelembagaan	Kepercayaan sebagai prasyarat pembelajaran sosial	Penguatan transparansi dan konsistensi diperlukan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa unsur-unsur pembelajaran sosial telah hadir dalam praktik koperasi, meskipun masih berada pada tahap perkembangan awal. Interaksi ekonomi yang berlangsung menunjukkan adanya pembelajaran berbasis pengalaman, sebagaimana dijelaskan Friedmann (1987), bahwa pengetahuan tidak hanya bersumber dari ahli, tetapi juga dari praktik masyarakat sendiri.

Dalam kerangka Argyris dan Schön (1978), pembelajaran yang terjadi saat ini cenderung berada pada tahap *single-loop learning*, yaitu perbaikan praktik operasional seperti efisiensi distribusi dan penyesuaian strategi usaha. Tahap ini merupakan bagian penting dalam evolusi organisasi. Sementara itu, pembelajaran tingkat lanjut (*double-loop learning*), yang mencakup refleksi terhadap struktur tata kelola, distribusi kewenangan, dan asumsi kelembagaan, masih memerlukan ruang dialog yang lebih terstruktur.

Penting untuk dicatat bahwa kondisi ini sangat dipengaruhi oleh usia kelembagaan koperasi yang belum genap satu tahun sejak pembentukannya pada Juni 2025. Dalam fase awal organisasi, fokus utama biasanya tertuju pada stabilitas operasional, pembentukan legitimasi, serta penguatan modal sosial antar anggota. Pembelajaran reflektif yang lebih mendalam umumnya berkembang seiring meningkatnya pengalaman bersama dan stabilitas usaha.

Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih Marindal II telah menunjukkan embrio pembelajaran sosial melalui pertukaran pengalaman ekonomi dan munculnya aspirasi kolektif. Tantangan ke depan bukan pada membangun pembelajaran dari nol, melainkan pada bagaimana menguatkan mekanisme refleksi bersama agar koperasi tidak hanya menjadi ruang transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi arena pembentukan kapasitas kolektif masyarakat desa.

Dampak Ekonomi dalam Perspektif Pembelajaran Sosial

Sejak dibentuk pada Juni 2025, Koperasi Desa Merah Putih Marindal II telah menjalankan dua unit usaha utama, yaitu dua gerai/toserba dan penyaluran Gas LPG 3 Kg. Unit gerai berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok anggota dan masyarakat sekitar, sementara distribusi LPG mendukung keberlanjutan usaha mikro seperti pedagang makanan dan usaha rumah tangga.

Dampak ekonomi yang dirasakan anggota terutama berupa kemudahan memperoleh bahan usaha dengan harga relatif stabil, sistem pembayaran yang fleksibel, serta terbentuknya jaringan usaha lokal yang lebih terkoordinasi. Bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang sembako dan usaha katering, kehadiran

koperasi membantu menjaga kesinambungan pasokan dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau pemasok luar desa. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai distributor barang, tetapi juga sebagai penghubung antar aktor ekonomi lokal.

Dalam kerangka *Planning as Social Learning* (Friedmann, 1987), dampak ekonomi ini dapat dipahami sebagai fase awal pembelajaran berbasis praktik. Anggota belajar mengelola stok, memahami fluktuasi harga, serta mengatur arus pembayaran melalui pengalaman kolektif. Pembelajaran terjadi dalam tindakan (*learning by doing*), meskipun belum seluruhnya diformalkan dalam evaluasi kelembagaan yang sistematis.

Jika dikaitkan dengan Argyris dan Schön (1978), pengalaman ini mencerminkan pembelajaran pada tingkat perbaikan operasional. Koperasi telah mampu menjadi ruang pembelajaran ekonomi praktis, di mana anggota menyesuaikan strategi usaha berdasarkan informasi bersama. Namun proses refleksi terhadap struktur tata kelola organisasi dan pola pengambilan keputusan masih berada pada tahap penguatan.

Untuk melihat perkembangan ini dalam konteks yang lebih luas, menarik untuk membandingkannya dengan beberapa koperasi desa lain yang telah menunjukkan capaian lebih lanjut.

Success Story dan Pembelajaran Komparatif

Beberapa Koperasi Desa Merah Putih di daerah lain menunjukkan dinamika perkembangan yang lebih matang. Misalnya, Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Tamanmartani (Sleman, DIY) yang diresmikan pada Mei 2025, dalam waktu kurang dari satu tahun telah memiliki lebih dari 1.000 anggota dengan lima unit usaha terintegrasi, termasuk toko sembako, sarana produksi pertanian, layanan simpan pinjam, hingga klinik dan apotek desa. Dukungan pemerintah kabupaten, perbankan nasional, dan kolaborasi dengan organisasi pengusaha daerah memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jejaring usaha.

Demikian pula Koperasi Desa Merah Putih Medan Krio (Kabupaten Deli Serdang) yang memiliki unit usaha lebih beragam, termasuk agen pupuk subsidi, unit simpan pinjam, layanan logistik, serta fasilitas gudang penyimpanan. Kolaborasi dengan Bank Himbara dan Badan Usaha Milik Negara sektor pupuk mendukung stabilitas operasional dan penguatan modal.

Keberhasilan koperasi-koperasi tersebut tidak hanya terletak pada jumlah unit usaha atau besaran modal, tetapi pada kemampuan mengintegrasikan dukungan struktural dengan partisipasi anggota yang semakin aktif. Dalam perspektif *social learning*, koperasi yang berkembang menunjukkan adanya perluasan interaksi kolektif, peningkatan kepercayaan sosial, serta mekanisme evaluasi yang lebih rutin.

Dibandingkan dengan kedua contoh tersebut, Koperasi Desa Merah Putih Marindal II masih berada pada fase awal konsolidasi. Namun perbandingan ini bukan untuk menilai ketertinggalan, melainkan untuk menunjukkan bahwa perkembangan pembelajaran sosial sangat dipengaruhi oleh usia kelembagaan, kapasitas manajerial, serta jejaring kolaborasi eksternal.

Peran Pemerintah, Kendala Operasional, dan Tantangan Strategis

Pemerintah desa dan Dinas Koperasi memiliki peran penting dalam pembentukan dan penguatan awal Koperasi Desa Merah Putih Marindal II.

Fasilitasi Musyawarah Desa Khusus, dukungan legalitas, pendampingan administrasi, serta pelatihan dasar pengelolaan koperasi menjadi fondasi struktural yang memungkinkan koperasi berdiri dan mulai beroperasi. Dukungan ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun institusi ekonomi kolektif di tingkat desa.

Namun dalam tahap implementasi, koperasi menghadapi sejumlah kendala operasional yang juga selaras dengan dinamika program Koperasi Desa Merah Putih secara nasional. Salah satu isu utama adalah akses permodalan. Di tingkat nasional, belum meratanya pencairan dukungan pembiayaan dari perbankan milik negara (Bank Himbara) menyebabkan sebagian koperasi belum dapat mengoptimalkan rencana usaha. Di Koperasi Desa Merah Putih Marindal II sendiri, struktur modal awal masih bertumpu pada simpanan pokok, simpanan wajib anggota, serta dukungan BUMDes yang relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada kapasitas pengadaan stok barang dan ekspansi unit usaha yang masih berskala terbatas.

Keterbatasan modal tersebut tidak hanya berdimensi finansial, tetapi juga memengaruhi ruang gerak organisasi dalam melakukan inovasi. Dalam kerangka pembelajaran sosial, keterbatasan sumber daya sering kali membuat organisasi lebih fokus pada stabilitas operasional dibanding refleksi kelembagaan yang lebih mendalam. Artinya, prioritas mempertahankan keberlangsungan usaha dapat membatasi waktu dan energi untuk memperluas dialog partisipatif. Keterbatasan akses modal dan pasar yang masih dihadapi koperasi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif. Strategi berbasis digitalisasi pembiayaan serta penguatan konektivitas pasar dinilai menjadi kunci keberlanjutan koperasi modern (Junaidi et al., 2025). Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih Marindal II, langkah ini dapat menjadi arah penguatan kelembagaan jangka menengah.

Selain aspek permodalan, tantangan sumber daya manusia juga menjadi isu penting di Koperasi Desa Merah Putih Marindal II. Kapasitas manajerial pengurus masih berkembang, terutama dalam hal perencanaan bisnis jangka menengah, pengelolaan risiko, serta pencatatan keuangan yang sistematis. Kondisi ini sejalan dengan tantangan nasional mengenai penguatan tata kelola dan profesionalisme pengurus koperasi desa. Transformasi dari pola kelembagaan berbasis bantuan menuju model usaha kolektif yang profesional memerlukan proses pembelajaran dan pendampingan berkelanjutan.

Isu kepercayaan sosial juga turut memengaruhi dinamika koperasi. Di tingkat nasional, penyebaran informasi tidak akurat atau penipuan yang mengatasnamakan koperasi dapat mengganggu persepsi publik. Di Koperasi Desa Merah Putih Marindal II, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih dalam proses pembentukan, mengingat usia kelembagaan yang belum genap satu tahun. Kepercayaan berkembang melalui konsistensi pelayanan, transparansi pengelolaan, dan pengalaman positif anggota. Tanpa penguatan kepercayaan, partisipasi cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya reflektif. Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat ditentukan oleh penerapan prinsip *good governance*, khususnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi desa (Saputri et al., 2025).

Pada tataran strategis, koperasi desa juga menghadapi tantangan integrasi

digital dan daya saing pasar. Di Koperasi Desa Merah Putih Marindal II, sistem pencatatan dan transaksi masih sederhana dan belum sepenuhnya berbasis digital. Sementara itu, koperasi perlu bersaing dengan pelaku usaha swasta yang telah memiliki jaringan distribusi lebih mapan. Kondisi ini menuntut peningkatan efisiensi, inovasi layanan, serta kemampuan membaca dinamika pasar lokal.

Risiko administratif dan regulatif juga menjadi perhatian dalam skema nasional Koperasi Desa Merah Putih. Pengelolaan dana publik dalam jumlah besar menuntut akuntabilitas yang tinggi. Meskipun skala operasional Koperasi Desa Merah Putih Marindal II masih relatif kecil, penguatan tata kelola menjadi penting untuk mencegah potensi kesalahan administratif di masa depan.

Dalam perspektif *Planning as Social Learning* (Friedmann, 1987), seluruh kendala tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses belajar kolektif. Organisasi yang masih muda seperti Koperasi Desa Merah Putih Marindal II sedang melalui fase konsolidasi, di mana stabilitas modal, penguatan kapasitas, dan pembentukan budaya organisasi menjadi prioritas awal. Tantangan yang dihadapi bukan semata-mata hambatan, melainkan konteks empiris yang membentuk proses pembelajaran sosial secara gradual.

Dengan demikian, tantangan akses modal, kapasitas manajerial, kepercayaan sosial, dan adaptasi pasar di Koperasi Desa Merah Putih Marindal II menunjukkan bahwa koperasi berada dalam fase penguatan institusional. Perkembangan menuju model pembelajaran sosial yang lebih matang sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, penguatan kapasitas anggota, serta perluasan ruang dialog yang memungkinkan refleksi bersama atas pengalaman yang dihadapi.

Evaluasi Implementasi *Planning as Social Learning*

Tabel 2. Matriks Evaluasi Implementasi *Planning as Social Learning* pada Koperasi Desa Merah Putih Marindal II

Dimensi Evaluasi	Temuan Empiris	Analisis dalam Kerangka Social Learning	Tahap Perkembangan
Konteks Pembentukan	Dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus sebagai tindak lanjut kebijakan nasional	Struktur kelembagaan tersedia sebagai fondasi awal	Fase institusionalisasi awal
Struktur Permodalan	Simpanan anggota dan dukungan BUMDes; akses modal eksternal masih terbatas	Modal kolektif menjadi dasar pembelajaran ekonomi, tetapi kapasitas ekspansi masih terbatas	Penguatan bertahap
Partisipasi	Keterlibatan melalui RAT dan komunikasi daring	Partisipasi administratif sedang berkembang menuju partisipasi reflektif	Tahap penguatan
Dialog dan Interaksi	Pertukaran informasi usaha aktif, namun forum refleksi belum rutin	Interaksi ekonomi menjadi dasar pembelajaran, refleksi kelembagaan masih berkembang	Sedang
Pembelajaran	Perbaikan operasional melalui pengalaman bersama	Dominan pembelajaran tingkat operasional (single-loop learning)	Sedang

Dampak Ekonomi	Stabilitas pasokan dan dukungan usaha mikro	Fungsi pemberdayaan mulai berjalan	Sedang–Baik
Peran Pemerintah	Fasilitasi dan pendampingan administratif	Dukungan struktural kuat, ruang dialog dapat diperluas	Sedang

Untuk memahami posisi Koperasi Desa Merah Putih Marindal II dalam kerangka *Planning as Social Learning*, diperlukan evaluasi yang melihat keterkaitan antara struktur kelembagaan, dinamika partisipasi, pembelajaran kolektif, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan secara dikotomis, melainkan untuk memetakan tahap perkembangan kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran sosial.

Sebagaimana dikemukakan Friedmann (1987), perencanaan yang berbasis pembelajaran sosial ditandai oleh adanya dialog antar pelaku, refleksi bersama, produksi pengetahuan kolektif, serta transformasi kapasitas aktor lokal. Dengan menggunakan kerangka tersebut, temuan penelitian dirangkum dalam matriks Tabel 2.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih Marindal II telah memenuhi prasyarat dasar pembelajaran sosial, khususnya melalui interaksi ekonomi dan pertukaran pengalaman usaha antaranggota. Proses ini mencerminkan pertemuan antara pengalaman lokal dan tindakan kolektif sebagaimana dijelaskan oleh Friedmann (1987), di mana pembelajaran tumbuh dari praktik nyata masyarakat.

Namun, refleksi kelembagaan dan produksi keputusan bersama secara sistematis masih berada pada tahap awal penguatan. Dalam perspektif Argyris dan Schön (1978), pembelajaran yang berkembang saat ini lebih berfokus pada perbaikan praktik operasional, sementara evaluasi yang menyentuh pola tata kelola dan distribusi peran masih memerlukan penguatan melalui forum refleksi yang lebih terstruktur.

Kondisi ini dapat dipahami dalam konteks usia kelembagaan koperasi yang belum genap satu tahun sejak pembentukannya pada Juni 2025. Pada fase awal organisasi, stabilitas struktur dan konsolidasi internal umumnya menjadi prioritas. Oleh karena itu, posisi koperasi saat ini dapat dimaknai sebagai fase transisi dari institusionalisasi awal menuju pembelajaran kolektif yang lebih reflektif dan terstruktur. Temuan ini sejalan dengan studi Zahro et al. (2025) yang menunjukkan bahwa koperasi desa baru cenderung berada pada fase institusionalisasi awal, dengan tantangan utama pada penguatan manajemen dan literasi kelembagaan.

KESIMPULAN

Koperasi Desa Merah Putih Marindal II merupakan hasil implementasi kebijakan nasional yang saat ini berada pada fase awal institusionalisasi, ditandai dengan terbentuknya struktur kelembagaan serta adanya dukungan pemerintah desa sebagai fondasi operasional. Partisipasi anggota telah mulai berkembang melalui forum formal, komunikasi daring, serta kontribusi simpanan pokok dan wajib, meskipun mekanisme dialog yang lebih reflektif dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama masih dalam tahap penguatan. Pembelajaran sosial juga mulai terbentuk melalui pertukaran pengalaman usaha dan interaksi

ekonomi antaranggota, yang mencerminkan proses pertemuan pengalaman lokal dan tindakan kolektif sebagaimana dijelaskan dalam konsep *Planning as Social Learning*, walaupun refleksi kelembagaan yang lebih sistematis masih perlu dikembangkan. Secara ekonomi, koperasi telah memberikan manfaat nyata berupa kemudahan akses bahan usaha, fleksibilitas sistem pembayaran, serta penguatan jaringan ekonomi lokal yang mendukung keberlangsungan usaha mikro anggota. Namun demikian, koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan akses permodalan, kapasitas manajerial pengurus, serta penguatan kepercayaan sosial anggota, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari proses pembelajaran organisasi pada tahap awal perkembangan kelembagaan. Oleh karena itu, implementasi *Planning as Social Learning* di koperasi ini dapat dipahami sebagai proses yang masih berada dalam fase transisi menuju pembelajaran kolektif yang lebih reflektif dan partisipatif. Ke depan, koperasi perlu memperkuat mekanisme pembelajaran tersebut melalui pengembangan forum evaluasi berkala yang melibatkan anggota secara aktif dalam perencanaan, pembahasan laporan, dan pengambilan keputusan, sehingga kualitas dialog dan partisipasi semakin meningkat. Selain itu, peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola melalui pelatihan berkelanjutan menjadi penting agar pengelolaan koperasi lebih profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika usaha. Upaya penguatan akses permodalan melalui sinergi dengan pemerintah desa dan lembaga pembiayaan juga perlu terus dilakukan untuk mendukung stabilitas operasional dan pengembangan unit usaha. Di sisi lain, koperasi harus menjaga dan memperkuat kepercayaan anggota melalui transparansi, komunikasi terbuka, serta akuntabilitas pengelolaan, mengingat kepercayaan sosial merupakan fondasi utama keberlanjutan kelembagaan. Terakhir, pengalaman operasional sehari-hari perlu didokumentasikan dan direfleksikan secara bersama agar praktik yang ada dapat berkembang menjadi pembelajaran organisasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Arief, M., & Haeruddin, H. (2025). Penguatan kelembagaan koperasi desa dalam mendukung transformasi ekonomi lokal. *Jurnal Pembangunan Desa*, 7 (1), 45-58.
- Dwika, G. C. S., Nurafni, A., Barus, V. A., Zhafira, T. A., & Hayati, F. (2024). Peran koperasi dalam mendorong pengembangan UMKM di masyarakat Kota Medan. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 5 (1), 1-8.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. London: Macmillan Press.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2003). Collaborative policymaking: Governance through dialogue. In M. A. Hajer & H. Wagenaar (Eds.), *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society* (pp. 33–59). Cambridge: Cambridge University Press.



- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- Junaidi, A., Rahman, F., & Kurniawati, L. (2025). Digitalisasi pembiayaan dan konektivitas pasar dalam penguatan koperasi desa. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan Digital*, 2 (1), 15-27.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Maryam, S. (2025). Legalitas Koperasi Desa Merah Putih dalam sistem hukum perkoperasian Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6 (2), 89-101.
- Mashuri, M., & Ediyono, S. (2025). Partisipasi masyarakat dalam Program Koperasi Merah Putih di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9 (1), 34-48.
- Mujino, M. (2012). *Manajemen koperasi dan pengembangan ekonomi rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Saputri, L., Subandriyo, B., & Hardiyan, R. (2025). Tata kelola dan good governance dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 12 (1), 22-37.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, T., & Raenaldi, M. (2025). Tantangan manajemen dan literasi kelembagaan dalam pengembangan koperasi desa. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Desa*, 3 (2), 66-79.
- Suyitno, A., Pramesti, R., & Kharisma, Y. (2025). Persepsi publik terhadap transparansi Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Desa*, 4 (1), 55-69.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Yani, R., & Wahyuni, S. (2026). Model community development dalam penguatan koperasi desa. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, 10 (1), 1-14.
- Zahro, N., Hadi, P., & Lestari, M. (2025). Pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berbasis PRA di Desa Bebel. *IRAJAGADDHITA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (2), 101-112.

